

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DALAM PERENCANAAN KELURAHAN KEDUNG BARUK

Nia Giant Virnanda Agustina¹, Yusuf Hariyoko^{2*}

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

*Corresponding author: yusufhari@untag-sby.ac.id

Abstract

In the process of changing the order of society's life towards a better one through development. The development process involves many factors and is interconnected, so organized planning is needed from administrative readiness to plans or concepts for development. In preparing development plans to determine policy direction and goals, accurate and accountable population data is needed, so that the use of population data can achieve the planned goals. Population data contains population registration and other important events summarized in the Population Administration Information System. This research discusses using population data to achieve state goals, namely community welfare. However, population data does not completely match the reality of local residents, so it is supported by survey results by local government officials. The research uses a descriptive method with a qualitative approach to obtain information to complete this research

Keywords : Development, Population Data, Administration

Introduction

Setiap tahunnya dibutuhkan program atau kegiatan yang membawa perubahan lebih baik yang memberikan pengaruh besar untuk mendukung kemajuan suatu negara untuk bersaing dalam dunia internasional. Dengan ini, dibutuhkan proses penyusunan perencanaan berkelanjutan untuk menyongsong program-program inovatif dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat dan memperhatikan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, didukung dengan adanya kegiatan edukatif mengenai pentingnya perencanaan pembangunan, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam perumusan tujuan perencanaan dan strategi yang akan diimplementasikan. Peran masing-masing tokoh masyarakat sangat penting dalam kegiatan perencanaan pembangunan (Keperawatan, 2022).

Pembangunan merupakan proses perubahan untuk memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik, sehingga dalam proses pembangunan melibatkan banyak faktor dan saling berhubungan satu sama lain, kemudian diperlukan perencanaan yang terorganisir dari kesiapan administrasi sampai rencana atau konsep dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan menjadi langkah awal dalam mencapai tujuan negara. Menurut Conyers dan Hills (1984) (Ui, 2010) mendefinisikan perencanaan pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan di masa yang akan datang. Selain itu, Jhingan (1984) mendefinisikan perencanaan pembangunan merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Proses perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan aspek kehidupan masyarakat, sehingga dalam proses pembangunan meminimalisir perselisihan dan kerugian dari

berbagai pihak baik dari aparat pemerintah sebagai perencana pembangunan ataupun masyarakat sebagai sasaran pembangunan, dibutuhkan keselarasan pemikiran dan tujuan melalui forum-forum yang telah disediakan seperti musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan).

Pada dasarnya perencanaan pembangunan merupakan pengambilan keputusan sebuah pilihan alternatif yang dianggap lebih baik diantara pilihan alternatif lainnya dengan pemanfaatan sumber daya yang ada. Sumber daya pada suatu daerah perlu ditinjau lebih dalam, sehingga dalam proses perencanaan pembangunan dapat memanfaatkan potensi-potensi dan mengatasi permasalahan masyarakat secara maksimal. Implementasi kegiatan harus disusun terlebih dahulu untuk meminimalisir resiko, karena ketidakpastian kondisi di masa yang akan datang. Dalam perencanaan pembangunan diperlukan perencanaan yang stategis agar dapat mengembangkan strategi-strategi yang efektif dan memperjelas arah tujuan dalam suatu pembangunan, sehingga dibutuhkan evaluasi pembangunan tahun sebelumnya untuk dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang menjadi penghambat dalam kehidupan masyarakat, serta dapat mengembangkan potensi-potensi yang masih bisa dikembangkan untuk membantu kehidupan masyarakat. Evaluasi pembangunan telah terangkum dalam dokumen RKPD (Rencana Kerja Pemerintahan Daerah).

Permasalahan yang dapat menghambat proses pembangunan, salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam kepengurusan administrasi kependudukan yang menjadi dasar pertimbangan pemerintahan untuk menyusun perencanaan pembangunan. Administrasi kependudukan adalah bentuk kegiatan penataan atau penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil. Dari kegiatan pengadministrasian akan menghasilkan data kependudukan untuk menjadi analisis perkembangan sebuah daerah. Sehingga administrasi kependudukan penting sebagai acuan perumusan kebijakan dan pembangunan, serta mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu, menghasilkan ketersediaan data kependudukan untuk memperbaiki tatanan masyarakat melalui perencanaan pembangunan. Dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kota Surabaya menjelaskan bahwa kategori lapangan usaha yang mengalami penurunan yaitu administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial. Hal tersebut terjadi karena masih rendahnya pendapatan asli daerah yang disebabkan belum pulihnya kemampuan ekonomi masyarakat untuk membayarkan kewajiban berupa pajak dan restribusi lainnya.

Tabel 1 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Seri Tahun Dasar 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Real Estate	5,08	5,78	6,09	2,00	1,63
Jasa Perusahaan	6,66	7,12	6,84	-7,11	1,97
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,85	2,17	3,64	-2,33	-0,12
Jasa Pendidikan	5,95	6,24	6,66	2,75	0,59
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,87	7,81	7,64	8,75	5,17
Jasa lainnya	2,89	5,18	5,94	-16,30	2,76
PDRB	6,13	6,20	6,10	-4,85	4,29
PDRB TANPA MIGAS	6,13	6,20	6,10	-4,85	4,29

Sumber : BPS Kota Surabaya, 2022

Dalam penyusunan rencana pembangunan untuk menentukan arah kebijakan dan tujuan dibutuhkan data kependudukan yang akurat dan akuntabel, sehingga pemanfaatan data kependudukan dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Makna pemanfaatan menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan turunan dari kata “manfaat” yang berarti suatu penghadapan yang semata-mata menunjukkan kegiatan menerima. Pemanfaatan adalah suatu cara dalam menggunakan sesuatu menjadi berguna atau bermanfaat. Data kependudukan merupakan data perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Kementerian Dalam Negeri RI, 2019). Data agregat yang dimaksud data yang dihasilkan dari peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan.

Data kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk Indonesia. Sehingga hak akses untuk mengelola data kependudukan terbatas dan perlu persetujuan kementerian dalam negeri untuk melindungi kebocoran data yang bisa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Hak akses hanya diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil provinsi, kabupaten/kota serta pengguna yang dimaksud yaitu kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, badan hukum Indonesia dan organisasi perangkat daerah. Lembaga tersebut diberikan kewenangan untuk menyelesaikan masalah dan meningkatkan kualitas pada lembaga organisasi atau instansi tersebut.

Pemanfaatan data kependudukan merupakan suatu proses penggunaan dokumen atau data kependudukan yang merupakan hasil dari pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil melalui sistem informasi administrasi kependudukan kepada lembaga pengguna yang diberikan akses oleh menteri. Kuantitas dan kualitas penduduk suatu negara menjadi suatu hal yang penting untuk dipertimbangkan, sehingga dalam melakukan rencana pembangunan perlu adanya tinjauan lebih dalam mengenai kondisi penduduk melalui data kependudukan. Pemanfaatan data kependudukan diatur dalam Permendagri nomor 102 tahun 2019 tentang persyaratan, ruang lingkup dan tata cara pemberian Hak akses serta pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Informasi data kependudukan tersebut digunakan untuk mendorong seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk menggunakan kebijakan data bersama (one data policy) yang merupakan data dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

Dengan kemajuan teknologi informasi, semakin memudahkan lembaga atau instansi baik pemerintah maupun swasta untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Dengan diterapkan otonomi daerah yang memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dengan memberikan peluang untuk pemerintah daerah menerapkan desentralisasi untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Pemerintahan daerah berhak menentukan rencana pembangunan pada daerahnya sendiri, sehingga dalam pertimbangannya ditentukan oleh data yang disimpan sesuai kebijakan daerah tersebut.

Dari beberapa hal diatas, menjelaskan data dan perencanaan pembangunan berkaitan sangat erat. Pada penelitian ini akan memberikan penjelasan pentingnya data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan untuk menentukan arah kebijakan dan tujuan pembangunan, serta data yang telah dikumpulkan akan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan masyarakat. Data juga berupa hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya untuk pertimbangan pembangunan pada tahun

selanjutnya. Dalam pengambilan keputusan berbasis data diperlukan tinjauan kembali untuk memperbarui data yang telah ada.

Methods

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif menurut Arikunto (2013) (Oliver, 2019) dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk menyelidiki, situasi dan kondisi yang sudah digambarkan, hasilnya disajikan dalam bentuk laporan penelitian. Metode ini juga mendorong untuk mengeksplorasi keadaan sosial yang diteliti lebih luas, menyeluruh dan mendalam. Menurut Sugiyono (2018) (Sugiyono, 2018) menjelaskan pendekatan kualitatif berdasarkan pemikiran pada eksperimen, peneliti sebagai instrumen dan teknik pengumpulan data dan analisis yang lebih menekan pada makna. Pendekatan kualitatif berfokus pada fenomena sosial, hak suara dan persepsi partisipan dalam studi kasus penelitian, sehingga pendekatan kualitatif pada penelitian ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai "Pemanfaatan data kependudukan dalam perencanaan pembangunan di kelurahan Kedung baruk".

Dalam pengumpulan data, terdapat beberapa teknik pengumpulan data diantaranya pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data dikumpulkan berupa data asli untuk menjawab masalah penelitian secara khusus sedangkan data sekunder merupakan data yang dihasilkan dari sumber berupa berita, buku, jurnal ataupun penelitian terdahulu. Pada penelitian ini, menggunakan pengumpulan data primer untuk mendapatkan data kependudukan dengan dilakukan wawancara kepada beberapa warga dan staff Kelurahan Kedung Baruk yang berwenang dalam menjalankan program sosial untuk mendapatkan hasil dari penelitian. Selain itu, menggunakan data sekunder dari jurnal, penelitian terdahulu dan data kependudukan yang telah dikelompokkan kedalam beberapa kategori dari kelurahan Kedung Baruk

Results

1. Perencanaan Pembangunan

Menurut Tjokromidjojo (1984) (Tjiptiherijanto dan Manurung, 2010), mendefinisikan perencanaan merupakan proses penyusunan kegiatan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian mendefinisikan pembangunan sebagai suatu proses perubahan sosial berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejateraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Jadi perencanaan pembangunan adalah suatu bentuk pemanfaatan sumber daya dalam proses pembangunan yang berdasarkan kondisi sosial ekonomi secara efektif dan efisien, sehingga perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai proses pengambilan keputusan dari berbagai alternatif untuk mencapai tujuan dan waktu yang telah direncanakan dimasa yang akan datang. Proses perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan aspek kehidupan masyarakat, sehingga dalam proses pembangunan meminimalisir perselisihan dan kerugian dari berbagai pihak baik dari aparat pemerintah. Dengan adanya perencanaan terstruktur dapat mempermudah implementasi pembangunan. Perencanaan pembangunan mempertimbangkan dari segala aspek yaitu kondisi, potensi, data masyarakat, serta kebijakan yang berlaku pada daerah tersebut. Perencanaan diberikan peluang untuk memilih berbagai alternatif yang terbaik dan dilakukannya penyusunan skala prioritas tujuan, sasaran dan kegiatan. Pembangunan dibutuhkan kerjasama antara sasaran pembangunan dan perencana pembangunan.

Menurut Bryson (2005) (Tjiptiherijanto dan Manurung, 2010) perencanaan strategis berkaitan dengan stakeholder yang bersangkutan untuk menyeleksi isu-isu atau pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan yang meliputi waktu, alasan dan cara dalam mencapai tujuan. Dengan adanya perencanaan strategis menciptakan pola pikir yang strategis dan menentukan masa depan dengan meninjau tujuan-tujuan yang belum tercapai, serta dapat menentukan prioritas dalam perencanaan pembangunan.

2. Perencanaan berbasis data

Perencanaan berbasis data merupakan metode pengambilan keputusan dan perencanaan yang menggunakan data yang relevan dan terukur, yang digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, mengembangkan rencana, dan mengukur pencapaian tujuan. Data digambarkan dalam bentuk fakta, numerik, informasi kualitatif dan hasil penelitian yang berhubungan dengan tujuan perencanaan. Dalam pengambilan keputusan dengan berbasis data berfokus pada data yang objektif, akurat dan terbaru. Dengan adanya data dalam proses perencanaan akan mempermudah untuk menentukan target-target pembangunan. Dalam perencanaan berbasis data membutuhkan identifikasi memilih dan menetapkan masalah, kemudian merumuskan akar masalah serta menentukan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan data yang didapatkan (MARZUKI, n.d.). Data kependudukan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang telah tercantum dalam tujuan negara, sehingga dalam mempertimbangkan perencanaan pembangunan dibutuhkan data penduduk yang akurat, terbaru dan akuntabel untuk meninjau lebih dalam kondisi dan menggali potensi yang ada pada suatu daerah. Dari data yang berkualitas akan mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas, hal tersebut telah tercantum pada undang-undang nomor 23 tahun 2014. Pemanfaatan data dalam penyusunan perencanaan, dimulai dari lembaga Dinas Komunikasi dan Informasi untuk menyiapkan data, kemudian diolah dan dianalisis serta dievaluasi pembangunan. Pada Badan Perencanaan Daerah yang memiliki wewenang dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah melakukan analisis dan evaluasi pembangunan, kemudian disampaikan dan dilakukan penyusunan draft rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Hasil dari evaluasi pembangunan dikonsultasikan dan disempurnakan dalam rancangan RKPD.

3. Kualifikasi Data Untuk Perencanaan

Basis Data adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data (Kementerian Dalam Negeri RI, 2019). Database memberikan informasi yang dibutuhkan suatu lembaga atau organisasi untuk menentukan suatu tujuan, sehingga dalam pemilihan data harus selektif untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang memberi dampak saat diimplementasikan. Selektif yang dimaksudkan dalam pemilihan atau mengelola informasi sesuai dengan fakta dan menghindari informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Sehingga, perlu adanya kualifikasi pemilihan data dalam proses perencanaan, diantaranya :

- Terbaru, dapat didefinisikan proses pemilihan data menggunakan data yang baru dirilis dari sebuah instansi atau lembaga resmi yang dihasilkan dari suatu peristiwa atau kegiatan masyarakat.
- Akuntabel, yang berasal dari kata akuntabilitas menurut Poae dan Saerang (2013) mendefinisikan pertanggungjawaban, baik oleh perseorangan ataupun lembaga atau badan yang terpilih atas tindakannya. Sehingga dalam akuntabel dalam data yaitu informasi telah disebarluaskan dapat dipertanggungjawabkan oleh stakeholders

- yang bersangkutan. Dengan ini, data dapat dibuktikan kevalidannya dengan dari sumber pengelola data.
- c. Akurat, mendefinisikan informasi yang disebarluaskan harus jelas dengan menggambarkan maksud yang disampaikan dan meminimalkan kesalahan. Sehingga data yang diperoleh harus sesuai dengan keadaan atau fakta di lapangan. Data yang akurat sangat diperlukan digunakan untuk pengambilan keputusan dari data yang diperoleh.

Discussion

1. Konsep data

Menurut Williams dan Sawyer (2007: p25), menjelaskan data berisi mengenai fakta-fakta dan angka-angka yang diolah menjadi sebuah infomasi dalam suatu organisasi. Sedangkan, makna lain dari data adalah keterangan objektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif ataupun gambar visual yang diperoleh melalui observasi langsung atau terkumpul dari sebuah perangkat penyimpanan (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional). Sehingga dalam perencanaan pembangunan diperlukan data untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta yang disebut informasi. Untuk penyediaan data untuk perencanaan dibutuhkan kerjasama antar lembaga atau instansi untuk saling koordinasi dan sinkronisasi. Pada era desentralisasi, proses *bottom up planning* mulai diimplementasikan, dalam proses perencanaan pembangunan sudah melibatkan masyarakat. Data kependudukan diperoleh dengan cara sensus penduduk, registrasi dan sampel survei yang kemudian disimpan di *database*. Sensus penduduk adalah perhitungan jumlah penduduk secara periodik, registrasi penduduk merupakan sumber data kependudukan yang bertujuan untuk keamanan dan perencanaan pembangunan kependudukan yang mencakup wilayah yang luas dan data yang disajikan selalu terbaru. Sampel survei merupakan pemberian pertanyaan mengenai permasalahan publik kepada beberapa orang yang relevan untuk menghasilkan sebuah data. Data kependudukan digunakan untuk keperluan pelayanan publik yang memberikan identitas dan kepastian hukum setiap orang dalam kepengurusan dokumen yang diperlukan. Selain itu, pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan digunakan dalam perencanaan daerah, sektoral ataupun nasional seperti perencanaan pendidikan, kesehatan, pegentasan kemiskinan dan lain sebagainya. Sebagaimana telah dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan Kelurahan Kedung Baruk yang merupakan pemerintahan desa yang berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan perundang-undangan dan tugas lain yang diarahkan dari pemerintah pusat ataupun daerah.

2. Pengumpulan data kependudukan

Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau aktivitas. Dalam perencanaan berbasis data dibutuhkan data dari lembaga atau portal resmi yang mempunyai wewenang pada masing-masing bidang. Pada data kependudukan terekam pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau disebut dengan SIAK merupakan sistem informasi yang dikembangkan berdasarkan prosedur-prosedur pelayanan administrasi kependudukan dengan menerapkan sistem teknologi informasi dan komunikasi guna menata sistem administrasi kependudukan di Indonesia. pada tahun 2020, SIAK menjadi terpusat untuk menyelaraskan data kependudukan, selain itu untuk mempermudah dalam mendapatkan informasi dan koordinasi mengenai data kependudukan untuk suatu kepentingan, di setiap kelurahan terdapat pegawai petugas dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Dengan adanya SIAK terpusat data kependudukan nasional diintegrasikan untuk mendapatkan data yang mutakhir.

3. Pengolahan data

Pengolahan data merupakan proses merubah data mentah menjadi informasi yang bermanfaat dan mudah diterima. Darmawan dan Fauzi (2013:26) menjelaskan informasi merupakan data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat yang akan datang. Dengan adanya pengolahan data akan mempermudah dalam pengambilan keputusan dengan hasil pengolahan data berupa informasi. Data dikelola oleh ilmuwan atau akademisi, serta sistem yang digunakan untuk merekam atau memproses perubahan kegiatan masyarakat pada bidang tertentu. Hasil dari wawancara oleh staff sie kesejahteraan masyarakat kelurahan Kedung Baruk, menjelaskan pengolahan data kependudukan dari pendaftaran penduduk dalam suatu program kemudian ditindaklanjuti untuk dianalisis lebih lanjut dalam kriteria suatu program untuk menentukan dokumen yang telah diserahkan konkret dan valid sesuai dengan program tersebut. Hasil dari analisis tersebut, akan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk di proses lebih lanjut sebelum diimplementasikan. Hal ini, bertujuan untuk menghindari kesalahan pada menentukan kelompok sasaran program. Pengolahan data dibutuhkan transparansi dalam prosesnya, dikarenakan data menjadi bahan pertimbangan suatu perencanaan pembangunan.

4. Implementasi pemanfaatan data

Kelurahan Kedung Baruk merupakan wilayah administratif yang dinaungi oleh kecamatan yang berada di kecamatan Rungkut kota Surabaya, memiliki jumlah penduduk sesuai data yang diberikan oleh staff aparatur pemerintahan setempat, yaitu 16.368 jiwa per oktober tahun 2023.

Tabel 2 Jumlah Penduduk Kelurahan Kedung Baruk

Umur	Perempuan	Laki-Laki
Balita (0 - 5 tahun)	591	618
Anak-Anak (6-15 tahun)	1.143	1.249
Remaja (16 - 24 tahun)	1.046	1.093
Dewasa (25 – 49 tahun	3.180	3.133
Lansia (50 – 65 tahun)	1.606	1.483
Usia Lanjut (66+ tahun)	587	524
Total	8.163	8.109
Total Keseluruhan	16.368 Jiwa	

Sumber : sayang warga kelurahan, (2022)

Dari data kependudukan akan dikelompokkan sesuai dengan kriteria masing-masing untuk mempermudah dalam menentukan kelompok sasaran suatu program. Pada penelitian ini, mengambil beberapa data yang dapat dianalisis mengenai pemanfaatan data kependudukan di Kelurahan Kedung Baruk. Berdasarkan DKB semester I tahun 2023 di Kelurahan Kedung Baruk diantaranya :

1. Data disabilitas warga

Tabel 3 Data Disabilitas Kelurahan Kedung Baruk

Jenis Disabilitas	Jumlah
Fisik	2 jiwa
Netra/Buta	4 jiwa
Rungu/wicara	7 jiwa
Mental/jiwa	22 jiwa
Fisik dan mental	2 jiwa
Lainnya	3 jiwa

Sumber : sayang warga kelurahan, (2022)

Hasil dari wawancara oleh kepala sie kesejahteraan masyarakat, dari data warga disabilitas dimanfaatkan untuk mengimplementasikan program Permakanan Paca merupakan program dari Dinas Sosial untuk membantu orang disabilitas dengan memberikan makanan dua kali sehari. Selain itu, dari pemerintahan memberikan alat bantu yang dibutuhkan seperti kruk, kursi roda, dan alat bantu lainnya sesuai kebutuhan warga. Makanan yang diberikan dari Pokmas (Kelompok Masyarakat) yang diberikan kepercayaan pemerintah daerah tersebut. Program tersebut diketahui telah berjalan sekitar dua tahun sampai saat ini. Setiap tahunnya data tersebut diperbarui, sehingga terdapat pemberhentian pemberian permakanan dikarenakan orang yang bersangkutan sudah tidak termasuk kualifikasi warga gamis ataupun pra gamis, serta sudah mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam proses pengajuan bantuan tersebut, membutuhkan proses yang cukup lama dikarenakan dalam proses dokumen yang diajukan dibutuhkan verifikasi dari pusat yang kemudian dilanjutkan survei langsung dari aparatur pemerintah setempat.

2. Data Warga Belum Bekerja

Tabel 4 Data warga belum bekerja Kelurahan Kedung Baruk

Laki-laki	2.050 jiwa
Perempuan	1.961 jiwa
Jumlah	4.011

Sumber : sayang warga kelurahan, (2022)

Dari data diatas dapat diketahui bahwa angka pengangguran di kelurahan Kedung Baruk cukup tinggi. Sesuai arahan dari Dinas Ketenagakerjaan yang berwenang untuk membina, mengendalikan, dan pengawasan pada bidang ketenagakerjaan menggagas program Padat Karya yang akan menjadi program untuk mengurangi angka pengangguran baik di daerah ataupun nasional, serta dapat meningkatkan perekonomian warga yang bersangkutan, program ini diimplementasikan di kelurahan Kedung Baruk. Program padat karya merupakan program yang memanfaatkan aset di wilayah pemerintahan kota Surabaya untuk kebutuhan prioritas seperti memberikan ruang bagi warga miskin atau pra miskin yang belum mendapatkan pekerjaan. Aparatur pemerintahan Kedung Baruk berperan sebagai menjebatani kebijakan atau program pemerintah pusat, menerapkan program padat karya yang sudah berjalan tahun ini. Sebelum adanya program ini, terdapat program pemberdayaan kelompok warga sesuai pengelompokan data kependudukan dengan diadakan pelatihan pada bidang masing-masing seperti kelompok UMKM yang

diberikan pelatihan mengenai pengolahan modal yang telah dikeluarkan agar dalam usaha terdapat kerugian. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan prinsip-prinsip diantaranya partisipasi yang merupakan peran aktif masyarakat pada setiap tahapan pembangunan desa yang diawali dari perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan, kemudian keberlanjutan dengan menjamin kegiatan terus berlanjut oleh masyarakat dan pemerintah desa, selanjutnya integrasi yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa untuk memenuhi kebutuhannya dan pada akhirnya desa mampu membiayai desanya sendiri. Selain itu, dibutuhkan transparansi terhadap segala informasi dan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan desa sehingga pelaksanaan atau pengelolaan program dilaksanakan secara terbuka. Kemudian prinsip prioritas diberikan peluang untuk diberikan kesempatan untuk memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kedesakan dan pemanfaatan sebagai upaya perbaikan lingkungan terutama dalam perekonomian. Yang terakhir yaitu demokratis yang digunakan untuk pengambilan keputusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Sasaran program padat karya adalah warga usia produktif dengan keadaan ekonominya kurang cukup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri atau keluarganya. Dalam program ini, bekerjasama dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, kemudian perusahaan tersebut memberikan kualifikasi ke staff kelurahan Kedung Baruk untuk dibantu untuk mencocokkan kualifikasi warga yang membutuhkan pekerjaan, sehingga dari pihak perusahaan dan warga yang bersangkutan bisa menjalankan pekerjaan sesuai kemampuan dan kebutuhannya. Hasil wawancara dari staff sie kesejahteraan masyarakat menjelaskan program padat karya tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, dikarenakan terdapat beberapa warga yang kurang menerima tugas ataupun penghasilan yang diberikan saat bekerja pada bidangnya, hal tersebut bisa terjadi warga tersebut kurang memahami jobdesk atau perjanjian sebelum menerima tawaran pekerjaan tersebut. Dari adanya program padat karya diharapkan dalam mengatasi permasalahan pengangguran dan kemiskinan di wilayah Kelurahan Kedung Baruk, serta meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

3. Data Warga Kurang Mampu



Gambar 1 Data Warga Kurang Mampu Kelurahan Kedung Baruk

Sumber : sayang warga kelurahan, (2022)

Data tersebut diperoleh dari website dengan akun kelurahan Kedung Baruk, untuk memenuhi kebutuhan warga setempat aparatur pemerintahan kelurahan Kedung Baruk menyalurkan bantuan dari pemerintah pusat berupa bansos dan PKH. Penerimaan bantuan sosial dari kementerian sosial disesuaikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ditetapkan oleh Kementerian sosial sebagai penerima bansos. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang belanja bantuan sosial pada kementerian negara/lembaga menjelaskan bantuan sosial merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu untuk melindungi masyarakat yang kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan bantuan sosial terdapat ketentuan tersendiri antara Gamis (Warga miskin) dan pra gamis. Gamis merupakan warga yang memiliki rata-rata pendapatannya Rp 1.500.000 per KK dengan persyaratan tidak memiliki kendaraan bermotor. Sedangkan pra gamis merupakan kondisi warga yang tidak mempunyai tempat tinggal sendiri tetapi masih mempunyai kendaraan bermotor. Dari kriteria tersebut, diperlukan survei oleh dari staff kelurahan kedung baruk untuk memastikan data benar dan program tepat pada sasaran.

Terdapat pengelompokan data yang resmi diterbitkan oleh BPS diantaranya data makro merupakan data yang diperoleh melalui mekanisme survei bersifat kualitatif yang dapat menggambarkan umum dan profil suatu daerah sebagai bahan analisis pengentasan kemiskinan, selain itu terdapat data mikro yang diperoleh melalui sensus bersifat kuantitatif yang memberikan informasi detail dan dapat digunakan sebagai intervensi program/kegiatan secara detail. Dengan program penanggulangan kemiskinan yaitu bantuan sosial, bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, serta mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Data warga yang termasuk dalam kategori extrem dibutuhkan perhatian penuh untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Menurut Todaro (2008:28) menjelaskan keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari perkembangan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok, dan meningkatnya rasa harga diri masyarakat sebagai manusia, serta meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih.



Gambar 2 Data Warga penerimaan Bansos dan PKH Kelurahan Kedung Baruk
Sumber : sayang warga kelurahan, (2022)

Dari data tersebut menggambarkan tersalurkannya bantuan sosial kepada warga setempat yang jembatani oleh aparatur pemerintahan kelurahan Kedung Baruk. Dari data tersebut, dapat diketahui sudah banyak warga telah menerima bansos dibandingkan yang belum mendapatkan bansos. Hasil dari wawancara staff sie kesejahteraan masyarakat menjelaskan untuk warga yang belum mendapatkan bansos, karena data yang diterima dengan hasil survei berbeda, sehingga data hasil survei tersebut disesuaikan dengan syarat penerimaan bantuan sosial dari pemerintahan. Warga yang menerima bantuan sosial melalui koordinasi dengan RT dan RW setempat, data yang telah diterima oleh staff kelurahan kedung baruk dari pemerintahan pusat, disortir disesuaikan dengan RT dan RW masing-masing, serta dilanjutkan pada warga yang bersangkutan.

Selain dalam program-program yang telah dijelaskan, pemanfaatan data kependudukan digunakan kepolisian untuk menyelesaikan kasus-kasus yang membutuhkan identifikasi tubuh manusia, seperti identifikasi jenazah yang tidak dapat dikenali dari peristiwa tragis, kasus tersebut menggunakan data kependudukan. Identifikasi jenazah dicocokkan dengan *database* yang diperoleh saat perekaman KTP usia 17 tahun. Selain itu digunakan sebagai dasar penyusunan DAU (Dana Alokasi Umum). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya juga mengarahkan setiap tahunnya, kelurahan memilih salah satu RW di kelurahan tersebut membentuk kampung madani. Kampung madani merupakan kampung dalam menjalankan kehidupan kemasyarakatan mengedepankan prinsip gotong-royong, keswadayaan dan kemandirian ekonomi yang mengoptimalkan peran zakat, infak, pengelolaan wakaf dari warganya untuk mendukung pembangunan secara multikultural yang berlandaskan pancasila. Program ini mengedepankan pendekatan kolaboratif untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Kolaboratif yang dimaksud yaitu sesama warga bekerjasama untuk menciptakan kemandirian pada wilayahnya, tetapi dalam kegiatannya masih dalam pengawasan pemerintah daerah setempat untuk proses evaluasi. Dari implementasi program kampung madani tersebut, akan didata oleh pemerintahan setempat untuk dianalisa faktor keberhasilan dan penghambat dalam pelaksanaan program tersebut, kemudian hasil dari analisis tersebut akan menjadi bahan pertimbangan perencanaan pembangunan selanjutnya. Dengan diimplementasikan kampung madani, mendorong warga untuk mengatas permasalahan kemiskinan.

Conclusion

Dalam menentukan tujuan perencanaan berbasis data, dibutuhkan koordinasi dan kerjasama antara masyarakat dan aparatur pemerintahan setempat agar menghasilkan data yang akurat, terbaru dan akuntabel. Untuk menghasilkan data tersebut, perlu adanya peran masyarakat untuk mendukung kevalidan data kependudukan yaitu kesadaran akan administrasi, terutama pada administrasi kependudukan sangat penting, karena peristiwa atau kegiatan masyarakat akan terekam pada *database* yang akan menghasilkan data yang dibutuhkan pemerintahan untuk digunakan bahan pertimbangan program atau kegiatan pembangunan. Administrasi kependudukan meiputi dokumen kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Dari data-data yang diperoleh dari aparatur pemerintahan Kelurahan Kedung Baruk dengan implementasi program yang telah dilaksanakan cukup baik, dapat dilihat sasaran program sesuai data yang diberikan dari pemerintah pusat. Tetapi pembaharuan data masih sangat diperlukan, untuk menentukan arah prioritas perencanaan pembangunan, dikarenakan setiap tahunnya keadaan kependudukan akan terus berubah. Program yang telah mencapai tujuan yang telah direncanakan, dapat dialokasikan ke prioritas yang lain, seperti bantuan sosial yang diperlukan pembaruan data secara terus menerus untuk mengidentifikasi perubahan sasaran program yang sudah tidak termasuk kriteria penerimaan bantuan sosial atau sasaran baru untuk penerimaan

bansos. Perencanaan pembangunan perlu juga untuk mempertimbangkan situasi dan kondisi di lapangan dengan menerapkan pendekatan primer yaitu dilakukannya sensus penduduk untuk menyesuaikan data dengan fakta di lapangan. Dengan menggunakan data, belum menjamin kebenaran data yang tersedia untuk meminimalisir kesalahan pengambilan keputusan ataupun dalam menyusun perencanaan pembangunan. Pada penelitian ini, terkendala dalam mendapatkan data tahun-tahun sebelumnya dikarenakan terdapat pergantian seluruh pegawai pemerintahan kelurahan Kedung Baruk, selain itu adanya renovasi dan pembangunan di kantor kelurahan sehingga sulit untuk menemukan berkas yang relevan dengan penelitian ini.

Reference

- Elviza, R. (2018). Perencanaan Sosial. *UIN Suska Riau*, 27(7), 16–38. http://repository.uin-suska.ac.id/13156/7/7.BAB II_2018384ADN.pdf
- Hukum, T., Bpk, U., Provinsi, P., & Barat, J. (2019). *Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan*. 2021.
- Kementerian Dalam Negeri RI. (2019). *Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan*. 1611. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/138595/permendagri-no-102-tahun-2019>
- Keperawatan, A. (2022). 3 1,2,3. 1(6), 913–918.
- Misdwiyanti Masuroh, H. (2018). Sistem Informasi Kependudukan Berbasis Web di Desa Ngrupit. *Jurnal of Misdwiyanti Masuroh*, 5–24. <http://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/668>
- Oliver, J. (2019). Jenis Metode Penelitian Dan Tata Cara Penulisan. *Hilos Tensados*, 1(1), 1–476.
- PemkotSurabaya.(2022).Layanan jebol Anduk Di Balai RW Permudah Warga Urus Adminduk..Diakses 16 Oktober 2023 dari <https://www.surabaya.go.id/id/berita/66860/layanan-jebol-anduk-di-balai-rw>
- Kementerian Dalam Negeri RI. (2019). *Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan*. 1611. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/138595/permendagri-no-102-tahun-2019>
- MARZUKI, A. G. (n.d.). Perencanaan Berbasis Data (Data Based Planning). *Files.Osf.Io*. <https://files.osf.io/v1/resources/536pa/providers/osfstorage/63de530e7d0187053ebc5e47?action=download&direct&version=1>
- Oliver, J. (2019). Jenis Metode Penelitian Dan Tata Cara Penulisan. *Hilos Tensados*, 1(1), 1–476.
- Sugiyono. (2018). Manajemen. *Manajemen*, 13–20.
- Tjiptiherijanto dan Manurung. (2010). Pengertian Perencanaan Pembangunan. *Tjiptiherijanto Dan Manurung*, 5(3), 248–253.
- Ui, F. E. (2010). *10 Universitas Indonesia Analisis konsistensi..., Sri Endang Mulyati, FE UI, 2010*. 10–23.
- Winarno, I. A. M. & W. W. (2022). Evaluasi Tingkat Pengguna Sistem Informasi Cyber Campus(Sicyca) Dengan Model Delone Dan Mclean. *Evaluasi Tingkat Pengguna Sistem Informasi Cyber Campus(Sicyca) Dengan Model Delone Dan Mclean*, 15–26.